I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan manusia yang semakin maju dan berkembang menuntut akan banyak hal sebagai suatu perubahan baik dari segi pembangunan dan kemajuan intelektual. Hal tersebut sangat perlu dilakukan untuk memenuhi setiap kebutuhan hidup manusia seperti, pertumbuhan penduduk yang terus menerus meningkat mengharuskan pembangunan akan perumahan dan bangunan untuk tempat tinggal semakin dibutuhkan. Cara untuk memenuhi kebutuhan lahan yaitu dengan pengadaan lahan (Mokoagow, dalam Yuniarti 2017). Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan perkembangan struktur perekonomian, kebutuhan lahan untuk kegiatan non pertanian cenderung terus meningkat. Kecenderungan tersebut menyebabkan alih fungsi lahan pertanian sulit dihindari (Sasono, dalam Yuniarti 2017).

Lahan merupakan sumber daya alam yang penting baik dalam pembangunan suatu negara ataupun suatu daerah. Lahan juga penting di berbagai sektor-sektor terkhususnya pada sektor pertanian. Di sektor pertanian, lahan sangat penting bagi petani maupun bagi pembangunan pertanian, hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa di Indonesia sebagai negara agraris dimana semua kegiatan pertanian hanya bertumpu pada lahan karena lahan berperan penting dalam kegiatan produksi yang dapat menghasilkan kebutuhan pangan yang dibutuhkan oleh setiap manusia. (Zara, 2015)

Pentingnya lahan bagi berbagai sektor tersebut membuat permintaan akan kegunaan lahan semakin meningkat, hal ini juga sejalan dengan pertumbuhan manusia yang tiap tahunnya meningkat. Semakain bertumbuhnya penduduk, lahan yang relative terbatas memiliki permintaan yang jumlahnya meningkat, karena lahan merupakan faktor produksi yang tidak bisa diproduksi lagi oleh manusia atau sering disebut *non produced input* (Mubyarto, dalam Zara 2015), maka dapat mengakibatkan terjadinya degradasi. Alih fungsi lahan pertanian pangan telah menurunkan daya dukung wilayah dalam menjaga kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan. (Zara, 2015).

Beras merupakan komoditas penting dan strategis bagi Indonesia karena merupakan ma kanan pokok dan sumber perolehan karbohidrat bagi lebih dari 200 juta jiwa penduduknya. Upaya dervisifikasi pangan tampaknya belum mampu mengubah preferensi penduduk terhadap beras. Bahan pangan non beras, meskipun juga mengandung karbohidrat, masih dianggap barang yang inferior. Berkaitan dengan hal ini, Mubyarto (dalam Ashari 2003) menyatakan bahwa dalam jangka panjang beras akan tetap menjadi pangan pokok penduduk Indonesia, sehingga kebijakan produksi beras akan tetap menjadi kebijakan inti dalam pembangunan pertanian.

Produk Domestik Regional Bruto atau yang sering disebut PDRB, pengertian domestik/regional disini dapat merupakan Propinsi atau Daerah Kabupaten/Kota. Transaksi Ekonomi yang akan dihitung adalah transaksi yang terjadi di wilayah domestik suatu daerah tanpa memperhatikan apakah transaksi dilakukan oleh masyarakat (residen) dari daerah tersebut atau masyarakat lain (non-residen). Semua barang dan jasa sebagai hasil dari kegiatan-kegiatan ekonomi yang beroperasi di wilayah domestik, tanpa memperhatikan apakah faktor produksinya berasal dari atau dimiliki oleh penduduk daerah tersebut, merupakan produk domestik daerah yang bersangkutan. Pendapatan yang timbul oleh karena adanya kegiatan produksi tersebut merupakan pendapatan domestik. Kenyataan menunjukkan bahwa sebagian dari faktor produksi yang digunakan dalam kegiatan produksi di suatu daerah berasal dari daerah lain atau dari luar negeri, demikian juga sebaliknya faktor produksi yang dimilki oleh penduduk daerah tersebut ikut serta dalam proses produksi di daerah lain atau di luar negeri. Hal ini menyebabkan nilai produk domestik yang timbul di suatu daerah tidak sama dengan pendapatan yang diterima penduduk daerah tersebut. Dengan adanya arus pendapatan yang mengalir antar daerah ini (termasuk juga dari da ke luar negeri) yang pada umumnya berupa upah/gaji, bunga, deviden dan keuntungan maka timbul perbedaan antara produk domestik dan produk regional (Badan Pusat Statistik, 2019).

Menurut data Badan Pusat Statistik Yogyakarta, sektor pertanian mempunyai peranan yang penting dalam perkembangan perekonomian di

Daerah Istimewa Yogyakarta. Tahun 2017 sektor pertanian memiliki kontribusi terbesar ketiga setelah sektor industri pengolahan serta sektor akomodasi dan penyediaan makan minum dalam pembentukan PDRB. Hal ini menyebabkan fluktuasi nilai tambah dari sektor pertanian sangat berpengaruh terhadap total PDRB Daerah Istimewa Yogyakarta. Kontribusi yang cukup besar ini utamanya berasal dari produksi tanaman pangan dan hortikultura yang mencapai 5,28 persen terhadap PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2017.

Menurut Tabel I.1 perolehan PDRB di Yogyakart sendiri pada bidang pertaniannya terbagi atas 7 sub sektor/sektor yaitu, partanian, tanaman pangan dan holtikultura, tanaman perkebunan, perternakan dan hasil, jasa pertanian dan perburuan, kehutanan, perikanan. Walaupun alih fungsi lahan pertanian di daerah Yogyakarta mengalami kenaikan tiap tahunnya, pada penghasilan PDRB di Yogyakarta ditahun 2016 ke 2017 mengalami peningkatan. Yang artinya produksi meningkat walau alih fungsi lahan juga meningkat, tetapi mengalami penurunan hasil di tanaman pangan dan holtikultura dari tahun 2016 ke 2017 menjadi 0,83%.

Tabel I.1. Produk Domestik Regional Bruto Pertanian di Yogyakarta tahun 2016-2017.

No	SUB SEKTOR/SEKTOR	2016 (%)	2017 (%)
1.	Pertanian	1,46	1,94
2.	Tanaman Pangan dan Holtikultura	1,30	0,83
3.	Tanaman Perkebunan	0,13	4,33
4.	Peternakan dan Hasil	2,16	3,91
5.	Jasa Pertanian dan Perburuan	2,88	4,31
6.	Kehutanan	1,17	2,88
7.	Perikanan	1,40	4,25
	TOTAL	**10,50**	**22,48**

Sumber : Badan Pusat Statistik Yogyakarta

Pulau Jawa yang selama beberapa dekade ini telah menjadi penopang utama produksi beras nasional. Peran Pulau Jawa tampak nyata ketika Indonesia mampu berswasembada beras tahun 1984. Pada saat swasembada tersebut, Pulau Jawa menyumbang lebih dari 62% dari total produksi beras nasional. Sampai saat ini Pulau Jawa masih cukup besar. Meskipun luasya hanya 7% dari luasan daratan total Indonesia, kontribusi Pulau Jawa terhadap beras nasional tidak pernah kurang dari 50%.

Namun seiring dengan dinamika pembangunan yang ditandai dengan transformasi sturktur ekonomi dan demografi, pada akhir tahun 1980-an telah terjadi fenomena alih fungsi (konversi) lahan sawah kepenggunaan non pertanian secara *massive* di Pulau Jawa. Hasil sensus Pertanian 1983 dan 1993 menunjukan bahwa selama kurun waktu 10 tahun telah terjadi penurunan lahan pertanian seluas 1,1 juta hektar. Dari penurunan luas lahan pertanian tersebut, sekitar 92% merupakan lahan pertanian di Jawa, dan sebegaian besar adalah

lahan sawah. Kondisi ini secara teoritis akan dapat mengganggu produksi pangan nasional, apalagi produktivitas padi nasional sudah menunjukan gejala *levelling of* sejak tahun 1985. (Ashari, 2003)

Menurut Tabel I.2 yang terlampir, dikatakan bahwa luas lahan di Provinsi Yogyakarta dari Kabupaten Kulon Progo sampai Kota Yogyakarta mengalami penaikan dan penurunan luas lahan. Berikut adalah tabel luas lahan sawah menurut Kabupaten/Kota di Provinsi D.I Yogyakarta, 2014 – 2016 dengan besaran Ha sebagai berikut :

Tabel I.2. Luas Lahan Sawah Daerah Istimewa Yogyakarta (Ha)

No	Kabupaten/Kota	Satuan	2014	2015	2016
1	Kulon Progo	Ha	10.296	10.366	10.366
2	Bantul	Ha	15.471	15.968,42	16.870,17
3	Gunung Kidul	Ha	7.865	7.865	7.875
4	Sleman	Ha	22.233	21.907	21.841
5	Kota Yogyakarta	Ha	65	62	60

Sumber: Badan Pusat Statistik Yogyakarta

Alih fungsi lahan yang terjadi tentu mempunyai dampak negatif, karena pada dasarnya lahan pertanian mempunyai fungsi yang luas baik dilihat dari aspek ekonomi, sosial maupun lingkungan. Secara ekonomi dan sosial dampak yang amat jelas adalah berkurangnya ketersediaan lapangan kerja pertanian dan pendapatan petani dan dilihat dari sisi lingkungan, sejumlah manfaat akan hilang bersama hilangnya fungsi sawah yang telah dikonversi ke non pertanian (Budi, dalam Zara 2015), sehingga alih fungsi lahan pertanian merupakan ancaman terhadap pencapaian ketahanan pangan serta mempunyai implikasi yang serius terhadap produksi pangan, lingkungan fisik, serta kesejahteraan masyarakat pertanian dan perdesaan yang kehidupannya bergantung pada lahannya.

Diakui bahwa Pulau Jawa, intensitas konflik dan pemanfaatan lahan lebih tinggi dibandingkan dengan pulau-pulau lain karena perluasan lahan-lahan petanian sudah sangat terbatas peluangnya. Sementara tuntutan kebutuhan lahan untuk pengembangan sektor industri, jasa dan perumahan semakin meningkat dan tidak mungkin dihindari sejalan dengan pertumbuhan ekonomi wilayah. Bila dilema tersebut tidak segera diatasi dengan mengembangkan kebijakan pertanian, maka keberlangsungan sektor pertanian di Jawa tidak mungkin dipertahankan (Nasoetion dan Rustiadi, dalam Ashari 2003)

B. Rumusan Masalah

Alih fungsi lahan dalam arti perubahan penggunaan lahan menjadi masalah yang pelik dan rumit sejalan dengan peningkatan pembangunan yang membutuhkan banyak lahan untuk pereluan bidang industri, pariwisata, permukiman dan sebagainya. Penggunaan lahan untuk pembangunan bidang-bidang tersebut telah mengalih fungsikan lahan-lahan pertanian dari fungsinya semula. Luas lahan pertanian di Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pertambahan penduduk dan perubahan struktur perekonomian menyebabkan adanya perubahan fungsi lahan dari lahan sawah ke lahan bukan sawah maupun non pertanian dan juga sebaliknya.

Kasus alih fungsi lahan sering muncul kepermukaan dan selalu menimbulkan polemik. Apakah alih fungsi lahan perlu dicegah sehingga swasembada beras dapat dipertahankan, atau dibiarkan alih fungsi lahan berjalan mulus asal sawah-sawah baru tetap dibangun. Contoh lain adalah kasus alih fungsi hutan lindung menjadi permukiman juga telah menimbulkan kerawanan dan “pekerjaan rumah” pemerintah yang tidak habis-habisnya (Muhajir Utomo 1992).

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah kecenderungan perubahan penggunaan lahan di Kabupaten Bantul Yogyakarta.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan:

1. Mengidentifikasi dan menentukan luas perubahan penggunaan lahan pertanian menjadi non pertanian ataupun sebaliknya di Kabupaten Bantul.
2. Memprediksi Trend luas penggunaan lahan pertanian dan non pertanian di tahun berikutnya di Kabupaten Bantul

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian Analisis Perubahan Penggunaan Lahan Pertanian dan Non Pertanian di Kabupaten Bantul ini bagi peneliti, masyarakat dan pemerintah daerah adalah sebagai berikut :

a. Bagi Peneliti

   Penelitian ini sebagai jalan untuk mengetahui luas perubahan penggunaan lahan pertanian yang ada di Kabupaten Bantul Yogyakarta serta menyelesaikan studi derajat sarjana di INSTIPER.

b. Bagi Masyarakat

   Hasil penelitian ini dapat menjadi wawasan keilmuan mengetahui dan memahami luas perubahan penggunaan lahan pertanian dan non pertanian di wilayah Kabupaten Bantul.

c. Bagi Pemerintah Daerah

   Hasil penelitian ini dapat menjadi pedoman bagi pemerintah daerah Bantul untuk melihat luas penggunaan dan perubahan lahan pertanian yang selanjutnya dapat menjadi gambaran terjadinya alih fungsi lahan.